

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi pejabat struktural OPD yang menguraikan jumlah personil dan tatalaksana OPD

2.2 Sumberdaya Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumberdaya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra OPD mengenai tantangan dan permasalahan yang berimplikasi terhadap pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang, yang menguraikan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan alokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD. Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, yang didasarkan pada tabel gambaran pelayanan OPD.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Kepala Daerah Terpilih Menguraikan tugas dan fungsi OPD terkait dengan visi, misi, serta program kepala dan wakil kepala daerah. Selanjutnya penjelasan tentang faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi dimaksud.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini menguraikan Hasil Kajian Tujuan dan sasaran dari Renstra K/L terhadap jenis Pelayanan dan program Dinas Ketahanan Pangan agar sinergitas Program Pemerintah Pusat dengan program daerah dapat ditingkatkan .

3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Mengungkapkan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan OPD;
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan OPD;
5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan OPD

BAB. IV. TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah

4.2. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

BAB.V. STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah

BAB. VI. RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Uraian singkat dan table indicator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 06 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan.

2.1.1. Tugas Pokok

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Fungsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki struktur organisasi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris ;
 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 1. Kasi Ketersediaan Pangan
 2. Kasi Sumber Daya Pangan
 3. Kasi Kerawanan Pangan
- d. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 1. Kasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
 2. Kasi Konsumsi Pangan

3. Kasi Keamanan Pangan

e. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Kasi Distribusi Pangan

2. Kasi Harga Pangan

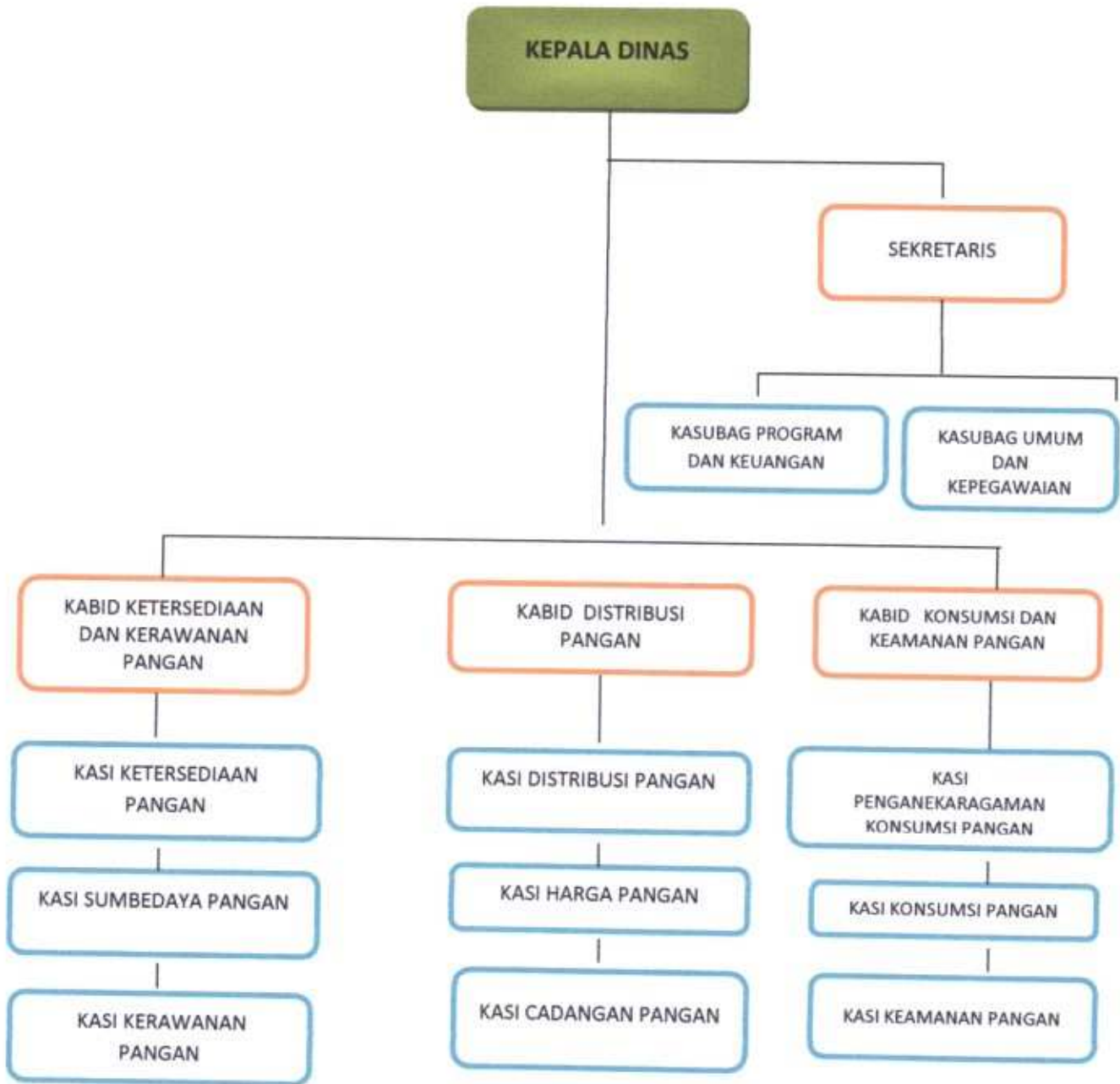
3. Kasi Cadangan Pangan

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya pejabat struktural baik yang definitif maupun yang belum dibantu oleh staf pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan menuju visi dan misi OPD dan visi misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Susunan struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN**



D. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Struktur dan Uraian Tugas Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam keputusan tersebut Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

Dalam keputusan tersebut uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pejabat struktural Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan

Dengan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pengelolaan urusan kepegawaian;
3. Pengelolaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; dan
6. Pengelolaan urusan umum.

Sekretaris membawahi membawahi 2(dua) sub bagian yaitu :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta Uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas;

2. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
3. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas;
4. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaaan dan pengiriman;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan system informasi;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tatausaha pimpinan dan protokol;
8. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
9. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
10. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan kendaraan dan;
11. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat;

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan Keungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan Uraian tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
6. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan;
2. Pelaksanaan penanganan kerawanan pangan; dan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.

Bidang ini membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan analisis ketersediaan pangan;
2. Penyiapan bahan koordinasi Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
3. Penyiapan bahan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM);
4. Penyiapan bahan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan; dan
5. Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan.

Kepala Seksi Sumber Daya Pangan

Kepala Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan.

Kepala Seksi Kerawanan Pangan

Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan kerawanan pangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan
2. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi;
3. Penyiapan bahan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan.

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan distribusi dan cadangan pangan. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
2. Pelaksanaan kegiatan pendistribusian pangan);
3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
4. Pelaksanaan pengendalian pasokan dan harga pangan;
5. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran dan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok local).

Bidang ini membawahi 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

Kepala Seksi Distribusi Pangan

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, kegiatan pendistribusian

pangan serta pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.

Kepala Seksi Harga Pangan

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengendalian pasokan dan harga pangan, penyusunan prognosa neraca pangan serta pengumpulan data harga pangan, di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga.

Kepala Seksi Cadangan Pangan

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran dan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal).

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
2. Pelaksanaan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita per tahun;
3. Pelaksanaan bimbingan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
4. Pelaksanaan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
5. Pelaksanaan promosikonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya local;
6. Pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;

7. Pelaksanaan koordinasi kerja sama antar lembaga Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
8. Pelaksanaan pengembangan pangan pokok lokal;
9. Pelaksanaan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
10. Pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
11. Pelaksanaan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
12. Pelaksanaan pengembangan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
13. Pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan.

Bidang ini membawahi 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

Kepala Seksi Konsumsi Pangan

Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penghitungan tingkat konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, bimbingan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga serta penyusunan peta pola konsumsi pangan.

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal, gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu, koordinasi kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, pengembangan pangan pokok lokal serta sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan

Kepala Seksi Keamanan Pangan

Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar, sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, pengembangan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD) serta sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan.

2.2.SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Kondisi Pegawai Perangkat Daerah Bulan Desember 2020

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pegawai Negeri Sipil(PNS) ada 24 Orang yang terdiri dari :

- 1 Orang Kepala Dinas
- 1 Orang Sekretaris Dinas
- 3 Orang Kepala Bidang
- 2 Orang Kepala Subbagian
- 8 Orang Kepala Seksi
- 9 Orang Pelaksana/Staf

Dalam Melaksanakan Tugas dan fungsi dinas Ketahanan Pangan juga di bantu oleh PHTT (Non PNS) sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai Berikut ;

- 5 Orang Tenaga Operator Komputer
- 12 Orang Tenaga Clening Service
- 10 Orang Tenaga Adminstrasi
- 4 Orang Satpam.

Tabel.2.2.1. Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan s/d Tahun 2020

Keadaan Pengawai menurut tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1 Pasca Sarjana	1	4,16
2 Sarjana	16	66,67
3 Diploma	3	12,5
4 SLTA	4	16,67
Jumlah	24	100
Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Golongan		

1	IV	6	25
2	III	15	62,5
3	II	3	12,5
4	I	0	0
Jumlah		24	100
Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Eselonering			
1	II.b	1	0
2	III.a	1	0
3	III.b	3	0
4	IV. a	10	1
Jumlah		15	1
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin			
1	Laki-laki	14	58,33
2	Perempuan	10	41,67
Jumlah		24	100

2.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Sarana dan prasarana perlengkapan kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

Tabel 2.2.2. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

No	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Tahun	Nilai Perolehan	Masa Manfaat	Penyusutan Per Tahun	Tahun ke.....	Jumlah Penyusutan	Sisa Masa Manfaat	Nilai Buku sebelum Rehab	Nilai Rehab	Nilai Perolehan setelah rehab	%	Tambahan Masa Manfaat	Jumlah Masa Manfaat Setelah Rehab	Nilai Buku Setelah Rehab	Penyusutan Per Tahun	Total Penyusutan	Nilai Buku Penyusutan
		Kode Barang	Register																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.02.05.0001. Mebel																				
	Meja Kerja 1/2 Biro	02.06.04.01.10	1	2016	1.500.000,00	5	300.000,00	4	1.200.000,00	1	300.000,00	0	1.500.000,00	0	0	1	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	300.000,00
	Meja Kerja 1/2 Biro	02.06.04.01.10	2	2016	1.500.000,00	5	300.000,00	4	1.200.000,00	1	300.000,00	0	1.500.000,00	0	0	1	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	300.000,00
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	19	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	20	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	21	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	22	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	23	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	24	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	25	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	26	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	27	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	28	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Sofa	02.06.02.01.48	2	2017	10.000.000,00	3	3.333.333,33	3	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00	0
Jumlah					30.500.000,00														29.900.000,00	
1.3.02.05.02.0004. Alat Pendingin																				
	Kipas Angin Rumah Dinas Anggota	02.06.02.04.06	1	2016	820.000,00	4	205.000,00	4	820.000,00	0	0	0	820.000,00	0	0	0	0	0	820.000,00	0

DPRD																			
Lemari Es 2 Pintu	02.06.02.04.01	1	2019	5.500.000,00	4	1.375.000,00	1	1.375.000,00	3	4.125.000,00	0	5.500.000,00	0	0	3	4.125.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	4.125.000,00
AC Split	02.06.02.04.04	16	2019	6.000.000,00	4	1.500.000,00	1	1.500.000,00	3	4.500.000,00	0	6.000.000,00	0	0	3	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
AC Split	02.06.02.04.04	17	2020	8.000.000,00	2	4.000.000,00	0	0	2	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	2	8.000.000,00	4.000.000,00	0	8.000.000,00
Jumlah				20.320.000,00															3.695.000,00

1.3.02.10.02.0003. Peralatan Personal Computer

Printer	02.06.03.05.03	10	2016	1.600.000,00	5	320.000,00	4	1.280.000,00	1	320.000,00	0	1.600.000,00	0	0	1	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00	320.000,00
Printer	02.06.03.05.03	11	2016	1.600.000,00	5	320.000,00	4	1.280.000,00	1	320.000,00	0	1.600.000,00	0	0	1	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00	320.000,00
Printer	02.06.03.05.03	12	2017	3.500.000,00	5	700.000,00	3	2.100.000,00	2	1.400.000,00	0	3.500.000,00	0	0	2	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00
Printer	02.06.03.05.03	13	2017	3.500.000,00	5	700.000,00	3	2.100.000,00	2	1.400.000,00	0	3.500.000,00	0	0	2	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00
Printer	02.06.03.05.03	14	2017	3.500.000,00	5	700.000,00	3	2.100.000,00	2	1.400.000,00	0	3.500.000,00	0	0	2	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00
Printer	02.06.03.05.03	15	2017	3.500.000,00	5	700.000,00	3	2.100.000,00	2	1.400.000,00	0	3.500.000,00	0	0	2	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00
Printer	02.06.03.05.03	16	2018	4.000.000,00	5	800.000,00	2	1.600.000,00	3	2.400.000,00	0	4.000.000,00	0	0	3	2.400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
Printer	02.06.03.04.08	1	2019	4.000.000,00	5	800.000,00	1	800.000,00	4	3.200.000,00	0	4.000.000,00	0	0	4	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
Printer	02.06.03.04.08	2	2019	4.000.000,00	5	800.000,00	1	800.000,00	4	3.200.000,00	0	4.000.000,00	0	0	4	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
Jumlah				29.200.000,00															14.160.000,00

1.3.02.05.01.0004. Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor

Etalase Kaca	02.06.01.04.12	1	2019	5.000.000,00	4	1.250.000,00	1	1.250.000,00	3	3.750.000,00	0	5.000.000,00	0	0	3	3.750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00
Filing Cabinet	02.06.01.04.14	1	2016	2.500.000,00	4	625.000,00	4	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00	0
Filing Cabinet	02.06.01.04.04	13	2017	2.500.000,00	4	625.000,00	3	1.875.000,00	1	625.000,00	0	2.500.000,00	0	0	1	625.000,00	625.000,00	1.875.000,00	625.000,00
Filing Cabinet	02.06.01.04.04	14	2017	2.500.000,00	4	625.000,00	3	1.875.000,00	1	625.000,00	0	2.500.000,00	0	0	1	625.000,00	625.000,00	1.875.000,00	625.000,00
Filing	02.06.01.04.04	15	2017	2.500.000,00	4	625.000,00	3	1.875.000,00	1	625.000,00	0	2.500.000,00	0	0	1	625.000,00	625.000,00	1.875.000,00	625.000,00

CCTV	02.07.01.01.34	1	2017	15.000.000,0 0	5	3.000.000,0 0	3	9.000.000,00	2	6.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	2	6.000.000,0 0	3.000.000,00	9.000.000,0 0	6.000.000,00
Alat Absensi / Fingerprint	02.06.01.05.17	1	2019	4.950.000,00	4	1.237.500,0 0	1	1.237.500,00	3	3.712.500,00	0	4.950.000,00	0	0	3	3.712.500,0 0	1.237.500,00	1.237.500,0 0	3.712.500,00
Jumlah				34.950.000,0 0														19.237.500,00	

1.3.02.05.02.0003. Alat Pembersih

Mesin Cuci Rumah Dinas Anggota DPRD	02.06.02.03.04	1	2016	1.810.000,00	4	452.500,00	4	1.810.000,00	0	0	0	1.810.000,00	0	0	0	0	0	1.810.000,0 0	0
				1.810.000,00														1.810.000,0 0	

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan Kab.Tanjung Timur tahun 2021

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan diarahkan fokus pada kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Program dan kegiatan bidang ketahanan pangan daerah merupakan kegiatan yang selalu bersentuhan masyarakat, baik pembinaan maupun bantuan sosial modal usaha bersama yang mana bertujuan agar pendapatan masyarakat tani dan keluarganya dapat meningkat. Ketahanan Pangan mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan bidang ketahanan pangan yaitu :

1. Ketersediaan yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya serta aman;
2. Distribusi pangan adalah pasokan yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga dan,
3. Konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang .

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Renstras sebelumnya yaitu Tahun 2019-2020 baik terkait dengan target capaian maupun realisasi anggaran tersaji dalam table T-C 23 . dan table T-C 24 sebagai berikut :

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		Skor PPH	89	-	-	-	93,33%	100%	-	-	-	96,7	98,92	-	-	-	104%	98,92%
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama		Konsumsi Energi	2.080	-	-	-	90,65%	95,15	-	-	-	362,95	232,71	-	-	-	400%	244,57 %
3	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan				-	-	-	12	12	-	-	-	11	12	-	-	-	92%	100%
4	Prevalensi Harga Pangan				-	-	-	CV<10%	CV<10%	-	-	-	CV<10%	CV<10%	-	-	-	CV<10%	CV<10%
5	Nilai IKM				-	-	-	75	77	-	-	-	-	77,70	-	-	-	-	100%
6	Nilai AKIP				-	-	-	65	67	-	-	-	-	60,18	-	-	-	-	89,82
7	Laporan Keuangan				-	-	-	sesuai	Sesuai	-	-	-	sesuai	sesuai	-	-	-	sesuai	sesuai

Tabel T-C.23 Anggaran dan Realisasi pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	-	186.900	2.007.413	2.520.163	2.116.333	-	1.661.530	1.956.231	2.364.373	2.080.088	-	888,99	97,45	93,82	98,29	1.366.162	2.015.556
Belanja Langsung	-	3.092.925	3.263.904	3.099.159	1.465.056		3.017.328	3.172.442	3.033.026	1.434.192	-	97,56	97,20	97,87	97,89	2.184.209	2.664.247
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.156.942	1.013.328	1.122.263	937.487		1.137.195	1.006.779	1.117.462	924.672	-	98,29	99,35	99,57	98,63	1.057.505	1.046.527
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	-	288.435	128.100	198.600	47.965		280.295	124.576	194.021	46.313	-	97,18	97,25	97,69	96,56	165.775	161.301
Program Peningkatan disiplin aparatur	-	21.300	20.950	23.000	-		21.300	20.950	23.000		-	100,00	100,00	100,00	0,00	16.313	21.750
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	15.000	15.000	10.000	-		14.400	14.250	10.000		-	96,00	95,00	100,00	0,00	10.000	12.883
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	4.950	1.100.000		0	0	4.950	1.100	-			100,00	0,10	276.238	1.513
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	-	0	0	0	3.875.000		0	0	0	3.870	-				0,10	968.750	968
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-	1.611.255	2.086.526	1.740.346	474.628,96		156.414	2.005.887	1.685.593	458.236	-	9,71	96,14	96,85	96,55	1.478.189	1.076.532

Regulasi Ketahanan Pangan

Pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan dari regulasi / peraturan – peraturan yang mendukung manajemen pengelolaan kegiatan baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan finansial. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan rapat - rapat koordinasi untuk sinkronisasi kegiatan ketahanan pangan yang hasil dari kegiatan ini adalah agar tersedianya rumusan kebijakan, program, dan evaluasi peningkatan ketahanan pangan

Aspek Ketersediaan Pangan

Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi, merupakan masalah besar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk menjawab masalah ini diperlukan informasi mengenai situasi pangan disuatu negara/daerah pada periode tertentu. Hal ini dapat terlihat dari gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita.

Persentase kecukupan pangan merupakan tingkat pencapaian dari berbagai kegiatan yang menunjang akan kecukupan pangan di Kabupaten. Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan. Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk digunakan sebagai bahan menyusun analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

Tabel Produksi Komoditi Pangan Tahun 2016-2020 Kab. Tanjung Jabung Timur

No	Komoditi	Produksi (Ton)					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Padi	90.052	92.414	97.983	118.507	66.001	540.066
2	Jagung	13.950	13.108	12.620	16.696	12.913	78.526
3	Kedelai	1.356	1.413	620	640	615	5.672
4	Kacang Tanah	99	176	54	66	58	519
5	Kacang Hijau	24	19	8	2	5	78
6	Ubi Kayu	5.523	6.482	3.450	2.021	3.105	26.969
7	Ubi Jalar	1.167	712	1.031	574	1.270	5.328
8	Daging						
	- Ruminansia	0	195,810	203,30	216,11	202,06	817,28
	- Non Ruminansia	0	809,86	851,97	858,94	933,85	2.080
9	Telur	0	2.010,59	2.121,98	2.117,24	3.493,448	9.743,26

Tabel 2. Perkembangan Ketersediaan Kalori Berdasarkan Neraca bahan Makanan (NBM) Tahun 2016-2018 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hari)		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Padi-padian	1.319,84	1.314,56	1.308,6
2	Makanan Berpati	51,17	48,66	66,4
3	Gula	110,58	150,87	154,1
4	Buah/Biji Berminyak	137,51	449,59	85,0
5	Buah-buahan	15,30	14,75	69,1
6	Sayur- sayuran	196,15	182,87	38,9
7	Daging	72,52	67,65	77,3
8	telor	31,39	34,30	33,9
9	Susu	28,74	30,60	38,2
10	Ikan	73,17	82,22	95,7
11	Minyak dan Lemak	433,60	429,43	383,7
	Jumlah	2.469,99	2.805,48	2.370,9

Tabel 3. Perkembangan Ketersediaan Kalori Berdasarkan Neraca bahan Makanan (NBM) Tahun 2019-2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hari)	
		2019	2020
1	Padi-padian	1.294,0	1.106
2	Umbi-umbian	53,8	56
3	Pangan Hewani	244,3	259
4	Minyak dan Lemak	301,5	317
5	Buah/Biji Berminyak	32,5	46
6	Kacang-kacangan	43,9	47
7	Gula	130,6	125
8	Sayur dan Buah	113,4	128
9	Lain-lain	37,6	34
Jumlah		2.252	2.199,1

Aspek Distribusi dan Akses Pangan

Distribusi dan akses pangan merupakan jembatan penghubung antara aspek ketersediaan pangan dan konsumsi pangan. Peran Distribusi pangan sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi. Begitu juga dengan akses masyarakat terhadap pangan baik akses fisik maupun ekonomi merupakan hal yang penting mendapat perhatian sehingga seluruh masyarakat dapat dipastikan dapat menjangkau pangan untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu untuk memastikan bahwa pangan dapat dijangkau oleh masyarakat maka pemerintah memantau kondisi stabilitas harga terutama terhadap pangan strategis dengan menghitung koefisien variasi harga. Koefisien variasi (CV) harga adalah perbandingan antara simpangan standar (standar deviasi) dengan nilai rata-rata harga yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data harga dari harga rata-ratanya. Semakin kecil nilai koefisien variasi maka menunjukkan harga semakin stabil atau dengan kata lain tidak terjadi gejolak harga. Harga dinyatakan terjadi gejolak jika Koefisien Variasi diatas 10%. Pada tahun 2020 , harga beras kualitas medium rata-rata sebesar Rp.10.879/Kg, harga tertinggi Rp.11.000/Kg dan terendah Rp.10.667/Kg. Secara umum koefisien vaiasi (CV) harga beras antar waktu cukup stabil, ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan stabilisasi harga pangan pokok cukup berhasil dengan CV = 3,02 %. Perkembangan harga beras periode Januari s/d Desember 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :